



**IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KB
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PADA KELURAHAN DADAPSARI KECAMATAN
SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

WAHYU ADI PAMUNGKAS

NIM 3312412051

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

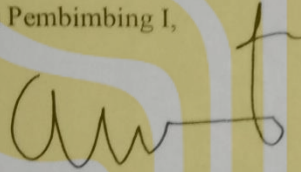
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke sidang
panitia ujian skripsi pada:

Hari : Rabu

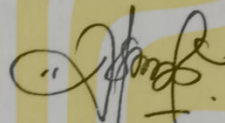
Tanggal : 29 Mei 2019

Dosen Pembimbing I,



MOH. ARIS MUNANDAR, S.Sos, MM
NIP. 19720724 2000031 1 001

Dosen Pembimbing II,

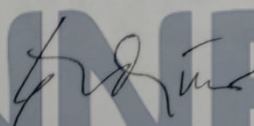


Puji Lestari, S.Pd., M.Si.
NIP. 19770715 2001122 2 008

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si
NIP. 19621120 198702 1 001

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di dalam Sidang Panitia Ujian Skripsi

Jurusan Politik dan kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri

Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Juli 2019

Penguji I

Dr. Sunarto, S.H., M.Si.
NIP. 196306121986011002

Penguji II

MOH.ARIS MUNANDAR, S.Sos.MM
NIP. 19720724 2000031 1 001

Penguji III

Dr. Puji Lestari, S.Pd., M.Si
NIP. 19770715 2001122 2 008

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

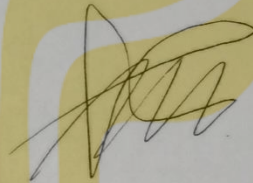


Dr. Moh. Solehatul Mustofa M.A
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari hasil karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lainnya yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 15 Juli 2019



Wahyu Adi Pamungkas
331212051



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ✓ *Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al-Insyirah 94: 6-8).*
- ✓ *"Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit." (Ali Bin Abi Thalib)*
- ✓ *Maafkanlah Musuh-musuhmu tapi jangan lupakan kesalahan-kesalahannya. (KH. Abdurrahman Wahid)*
- ✓ *Kesuksesan seseorang bukan berarti kegagalan seseorang begitu juga sebaliknya*
- ✓ *Puncak Keangkuhan seorang yang belajar ilmu politik adalah tidak tertarik dengan kekuasaan.*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. *Bapak Adi Riyanto dan Ibu Kasmini,, sebagai Inspirator sejatiku*
2. *Kampusku tercinta Universitas Negeri Semarang Fakultas Ilmu Sosial*
3. *Jurusan kebanggaan saya Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Prodi Ilmu Politik*

4. Dosen pembimbing Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM dan Dr. Puji Lestari S.Pd.,M.Si. yang selalu membimbing dan memberikan arahan selama skripsi ini disusun

5. Ulul Mukmin, Wahid Nurul Huda, Rian Aryani, Rusdi Sutandi, Muhamamad Mughil Labib, Arif Muamar Wahid, Muhammad Kasyfan Senior terbaikku

6. Erman Istanto, Herman Rahmawanto, Mafridho Bagus Yusuf, Yoga Adiityatama, Zakiyatul, Mugi Lestari, Fathista, Zumrotun, Riris, Ines, Melani, Chamdy, Tri Aji Rekan dan sahabat terhebat

7. Keluarga perubahan BEM KM Unnes 2015 Kabinet Gelora Perubahan, Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa yang selalu kebersamai setiap detik perjuangan.

8. Sahabat di Jurusan Politik dan Kewarganegaraan angkatan 2013 yang selalu berjuang bersama.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

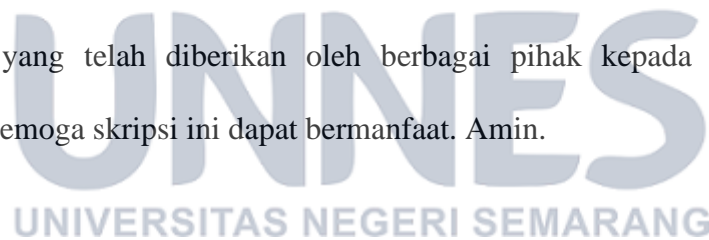
PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KB DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA KELURAHAN DADAPSARI KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG.”** Selama menyusun Skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan, kerjasama, dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Moh.Solehatul Mustofa M.A, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan PKn Universitas Negeri Semarang.
4. MOH.ARIS MUNANDAR, S.Sos, MM Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr.Puji Lestari, S.Pd., M.Si, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Andi Suharyanto, S.Pd, M.Si, Dosen Wali yang telah memberi motivasi, saran dan inspirasi dalam bidang akademik maupun pengembangan diri.
7. Bapak Dr. Sunarto, S.H., M.Si, Dosen penguji yang telah menyempurnakan hasil skripsi yang telah saya buat.

8. Ibu Dosen Jurusan PKn yang telah memberikan Ilmunya selama masa studi kepada penulis.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
10. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Semarang
11. Kantor BKKBN Perwakilan Jawa Tengah
12. Kepla Kampung Keluarga Berencanan kelurahan dadapsari Bapak Dwi yang telah bersedia memberikan waktunya untuk Skripsi ini
13. Keluarga besar organisasi HIMA PKn 2013, BEM FIS 2014 dan BEM KM UNNES 2015
14. Sekolah Integritas Pattiro Semarang
15. Teman-teman program studi Ilmu Politik angkatan 2012
16. Seluruh pihak dan instansi yang telah mendukung terselesaikannya penulisan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada sesuatu apapun yang dapat diberikan penulis, hanya ucapan terima kasih dan untaian doa semoga Allah SWT memberikan imbalan atas kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.



Semarang,

2019

SARI

Adi Pamungkas,Wahyu.2015. *Implementasi Program Kampung KB dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan pada kelurahan dadapsari kecamatan semarang utara kota semarang.* Skripsi, Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial , Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing MOH.Aris Munandar, S.Sos,MM. Dan Dr. Puji Lestari ,S.Pd, M.Si

Kata kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Kemiskinan

Kemiskinan menjadi suatu permasalahan klasik hampir seluruh kota besar di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan dengan standar garis kemiskinan (poverty line) makanan dan non makanan. Garis kemiskinan makanan yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setaradengan 2100 kalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan adalah besarnya rupiah untuk memenuhi kebutuhan minimum non makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, pakaian dan barang /jasa lainnya. Garis kemiskinan ini memiliki kesamaan dengan garis kemiskinan menurut Bank Dunia yaitu diukur menurut pendapatan seseorang. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan satuan rumah tangga untuk mengukur tingkat kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana implementasi Kampung KB dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Dadapsari 2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program Kampung KB dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Dadapsari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi Penelitian adalah Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Fokus Penelitiannya adalah 1. Implementasi program Kampung KB di Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang: a) Sumber daya yang berkenaan dengan sumber daya manusia dalam program ini yang memiliki kewenangan dalam implementasi program Kampung KB di Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. b) Sumber daya non manusia seperti fasilitas dan wewenang yang mendukung implementasi tersebut. c) Disposisi, kecenderungan sikap positif pelaksanaan untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi tujuan dalam implementasi program Kampung KB di Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. 2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Kampung KB di Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Kampung KB di Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang berjalan baik dan memberikan dampak dan manfaat yang cukup besar kepada masyarakat baik dalam aspek kesehatan, sosial maupun ekonomi. Utamanya adalah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Adanya Kampung KB memberikan edukasi kepada masyarakat baik pada aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi keluarga. Dalam hal ini keberadaan Kampung KB di Kelurahan Dadapsari telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peranan pemerintah dan juga elemen-elemen masyarakat menjadi faktor pendorong yang sangat penting bagi berlangsungnya program Kampung KB di Kelurahan Dadapsari. Pemerintah melalui dukungannya secara formil dan juga elemen-elemen masyarakat yang secara praktis bahu membahu demi keberlangsungan program Kampung KB ini. Sementara itu faktor penghambat pelaksanaan program kampung KB di Kelurahan Dadapsari meliputi dua faktor utama yakni kesadaran masyarakat yang rendah, serta kurangnya tenaga penyuluh yang membuat pelaksanaan program kampung KB di Kelurahan Dadapsari berjalan kurang maksimal.

Untuk itu saran kepada para pihak yaitu Pemerintah sebaiknya lebih meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan program Kampung KB, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah seharusnya menampah jumlah personil tenaga penyuluh agar program Kampung KB dapat berjalan maksimal. Masyarakat sebaiknya lebih proaktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan Kampung KB, karena tujuan akhir dari program ini salah satunya adalah mensejahterakan masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Istilah	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Konsep Kemiskinan	9

1. Pengertian Kemiskinan.....	9
2. Indikator Kemiskinan	13
3. Ciri-Ciri Kemiskinan	14
4. Dimensi Kemiskinan	15
5. Jenis Kemiskinan.....	16
6. Penyebab Kemiskinan	18
7. Pola Kemiskinan.....	21
8. Model-Model Pengukuran Kemiskinan.....	21
9. Pengertian dan Indikator Kemiskinan	23
B. Program Kampung Keluarga Berencana.....	23
1. Konsep Kampung Keluarga Berencana.....	23
2. Tujuan Kampung Keluarga Berencana.....	24
3. Prasyarat Kampung Keluarga Berencana	25
4. Kriteria Pemilihan Wilayah Kampung Keluarga Berencana.....	26
C. Kebijakan Publik.....	28
1. Konsep Kebijakan Publik.....	28
2. Implementasi Kebijakan Publik	30
3. Faktor Penghambat Kebijakan Publik.....	34
D. Penelitian Relevan.....	34
E. Kerangka Berpikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Latar Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian.....	41

C. Fokus Penelitian	41
D. Sumber Data Penelitian.....	43
E. Alat Dan Teknik Pengumpulan Data	44
F. Uji Validitas Data	45
G. Metode Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum	47
B. Hasil Penelitian.....	49
C. Pembahasan	57
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	67



DAFTAR TABEL

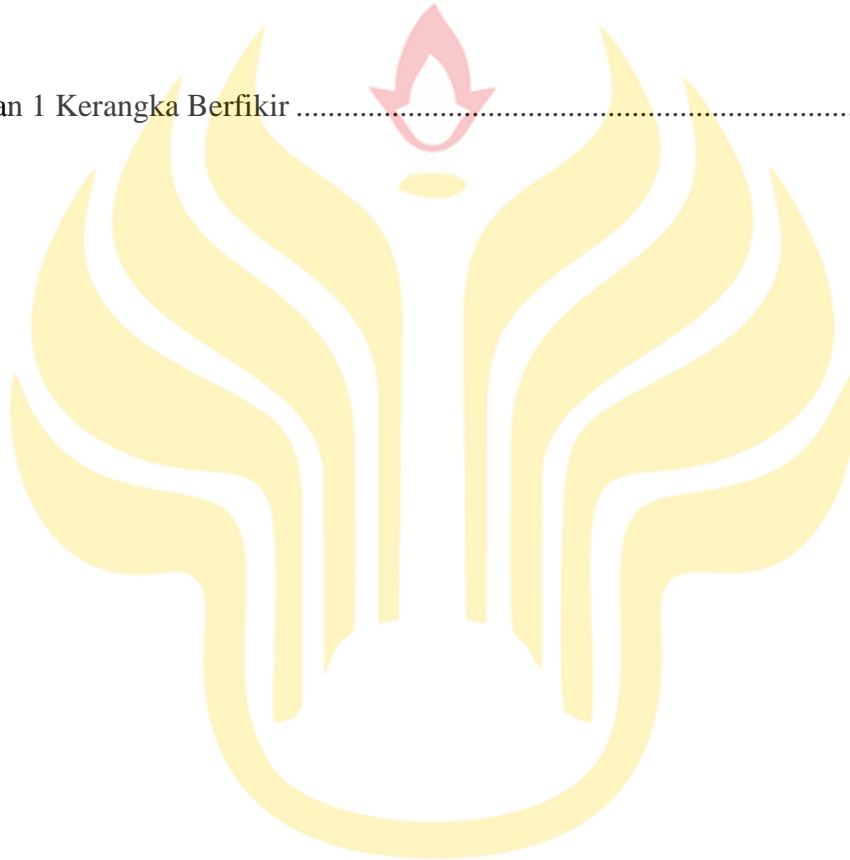
Tabel 1 Daftar Penduduk Kelurahan Dadapsari Berdasarkan Kemiskinan 49



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Berfikir 39



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kelurahan Dadapsari 47



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran

Lampiran 1 Instrumen Penelitian Skripsi

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4 Modul Kampung KB

Lampiran 5 Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 6 Surat Ijin Penelitian ke Kesbangpol kota semarang

Lampiran 7 Surat ijin observasi ke Kelurahan Dadapsari



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan menjadi suatu permasalahan klasik hampir seluruh kota besar di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) (dalam khomsan, ali.dkk 2015:12) mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan dan non pangan. Garis kemiskinan makanan yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setaradengan 2100 kalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan adalah besarnya rupiah untuk memenuhi kebutuhan minimum non makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, pakaian dan barang /jasa lainnya. Garis kemiskinan ini memiliki kesamaan dengan garis kemiskinan menurut Bank Dunia yaitu diukur menurut pendapatan seseorang. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (dalam khomsan, ali.dkk 2015:14) menggunakan satuan rumah tangga untuk mengukur tingkat kemiskinan. Kemiskinan berada pada keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) yang ditandai oleh kesulitan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan non ekonomi. Di samping merujuk kepada individu dan rumah tangga penduduk miskin, ukuran kemiskinan juga dengan pendekatan melalui pengamatan daerah miskin. Terdapat hubungan yang kuat antara wilayah miskin dengan penduduk miskin, sehingga dengan mengetahui wilayah miskin dapat diharapkan ditemui mayoritas penduduk miskin.

Di Indonesia sendiri angka kemiskinan masih cukup tinggi yaitu 25,95 juta orang berdasarkan survei BPS pada maret 2018 sehingga jumlah orang miskin di Indonesia mengalami penurunan sebesar 633.000 menjadi 25,95 juta dari kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta. Dari 633 ribu orang, sebagian besar dicatatkan jawa tengah. Provinsi yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo ini mencatatkan penurunan kemiskinan sebesar 300.290 jiwa. Dengan penurunan sebesar itu, persentase kemiskinan di Jawa tengah juga turun signifikan dari 12,23% ke 11,32%.

Sebagai sebuah permasalahan klasik tentu pemerintah tidak tinggal diam dalam menangani kemiskinan ini. Terbukti angka kemiskinan dari tahun-ketahun terus mengalami penurunan. Meskipun mengalami penurunan namun angka kemiskinan tersebut masih dikatakan besar. Terkhusus di kota semarang sebagai ibu kota provinsi jawa tengah alih-alih angka kemiskinannya berkurang, namun justru bertambah. Padahal, “intervensi” anggaran yang disediakan pemkot dari tahun ke tahun terus naik. Data Bappeda pada tahun 2016 jumlah warga miskin 54028 sedangkan Tahun 2015 meningkat menjadi 54485. Kondisi seperti ini tentunya akan dapat menjadi beban dalam upaya pembangunan daerah Kota Semarang. Karena, pekerjaan rumah (PR) untuk mengentaskan kemiskinan masih tetap menjadi tantangan yang belum dapat dijawab dengan baik.

Sebagai ibukota provinsi, semarang tentu menjadi sorotan utama penanggulangan kemiskinan di jawa tengah. Penyelesaian problem kemiskinan menjadi salah satu prioritas Pemkot Semarang hingga kini.

Keseriusan pemerintah kota Semarang dalam menanggulangi kemiskinan dapat kita lihat dari Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/680/-2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2015. Memuat angka 367.848 jiwa atau 114.939 kepala keluarga (KK) yang masuk dalam kategori miskin dari 1.767.086 jumlah penduduk kota Semarang. Walikota Semarang Hendrar Prihadi menetapkan kebijakan atas hal ini dengan Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Melalui Harmonisasi Ekonomi, Edukasi, Ekosistem, Etos Bersama Masyarakat (Gerbang Hebat) sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan.

Salah satu fokus dari Gerbang Hebat adalah program Keluarga Berencana (KB). Program KB yang sejatinya sudah dibangun sejak dulu masih relevan untuk diterapkan saat ini namun perlu ditambahkan programnya agar tak monoton hanya membagi alat kontrasepsi maupun hanya sosialisasi. Mengembalikan Program Keluarga Berencana sebagai solusi pertumbuhan penduduk adalah langkah tepat, selain jumlah penduduk dapat ditekan sisi sosial dan ekonomi pun tergarap. Tak hanya menekan pertumbuhan penduduk, pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB) ini juga terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan masyarakat melalui pemberdayaan potensi masyarakat di daerah tersebut untuk bisa meningkatkan standar kesehatan dan perekonomian. Dengan melambatkan pertumbuhan penduduk, niscaya akan mengurangi angka kemiskinan karena beban hidup keluarga akan semakin berkurang.

Program KB di Kota Semarang ini di kemas dalam inovasi baru berupa Kampung Keluarga Berencana (KB). Kampung KB merupakan suatu program dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota Semarang yang juga terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan masyarakat. Kampung KB tidak hanya fokus pada menekan laju pertumbuhan penduduk saja, tetapi juga bagaimana memberdayakan potensi masyarakat di daerah tersebut untuk bisa meningkatkan standar kesehatan dan perekonomian. Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki kriteria tertentu yang dilakukan secara sistemik dan sistematis. Salah satu Kampung KB di Kota Semarang adalah Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Adapun kriteria ditetapkannya Kelurahan Dadapsari sebagai Kampung KB baik kriteria utama berupawilayah dan kriteria khusus. Dalam hal kriteria utama, sebuah kampung KB harus memiliki syarat-syarat seperti jumlah keluarga miskin diatas rata-rata tingkat desa dimana Kampung / RW tersebut berada. Bagi yang membentuk setara Desa, jumlah keluarga miskin di Desa tersebut harus diatas rata-rata Kecamatan dimana Desa itu berada. Selain itu, syarat utama lainnya adalah pencapaian KB di desa tersebut sangat rendah.

Kelurahan dadapsari merupakan salah satu kelurahan dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi di kota Semarang. Berdasarkan data sistem

informasi warga miskin kota Semarang pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin kelurahan Dadapsari 210 kepala keluarga(KK) atau 732 jiwa. Sementara itu 2015 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan yaitu berjumlah 217 kepala keluarga(KK) atau 757 jiwa. Hal tersebut tersebut menjadi permasalahan bagi kelurahan Dadapsari mengingat angka kemiskinan yang cenderung bertambah.

Data kemiskinan tersebut menunjukkan perlu adanya penanganan khusus terhadap persoalan kemiskinan di kelurahan Dadapsari. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi implementasi program Kampung KB sebagai salah satu andalan dalam penanganan kasus kemiskinan. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang tanggal 17 Maret 2017 Nomor 014.6/283 tentang penetapan lokasi wilayah Kampung Keluarga Berencana Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan BKKBN Provinsi Jawa Tengah membentuk Kampung KB. Program Kampung KB merupakan salah satu gerakan membangun desa dan termasuk dalam program penanggulangan kemiskinan. Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Menarik menjadi sebuah penelitian bagaimana implementasi program Kampung KB dalam menanggulangi dan menangani persoalan kemiskinan di kelurahan Dadapsari. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul

(“Implementasi Program Kampung KB dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan pada kelurahan dadapsari kecamatan semarang utara kota semarang)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi Kampung KB dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program Kampung KB dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui implementasi Kampung KB dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Kampung KB, tentang penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi, memperkaya khazanah keilmuan dan

kajian ilmu politik, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta sebagai sarana aktualisasi diri untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dengan membandingkan fakta di lapangan.

E. Batasan Istilah

1. Implementasi adalah Pelaksanaan, penerapan implemen. Implemen adalah alat, peralatan (Partanto, Pius A. dan Al Barry, M. Dahlan, 1994:247)
2. Kebijakan adalah salah satu konsep dalam ilmu politik (Budiardjo, Miriam 2009:2).
3. Kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada di bawah satu garis kemiskinan tertentu. (Kurniawan dalam khomsan, ali.dkk 2015:2)
4. Keluarga Berencana adalah Upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, sejahtera dan berkualitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) (dalam khomsan, ali.dkk 2015:12) mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan dan non pangan. Garis kemiskinan makanan yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setaradengan 2100 kalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan adalah besarnya rupiah untuk memenuhi kebutuhan minimum non makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, pakaian dan barang / jasa lainnya. Garis kemiskinan ini memiliki kesamaan dengan garis kemiskinan menurut Bank Dunia yaitu diukur menurut pendapatan seseorang.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (dalam khomsan, ali.dkk 2015:14) menggunakan satuan rumah tangga untuk mengukur tingkat kemiskinan. Kemiskinan berada pada keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) yang ditandai oleh kesulitan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan non ekonomi. Di samping merujuk kepada individu dan rumah tangga penduduk miskin, ukuran kemiskinan juga dengan pendekatan melalui pengamatan daerah miskin. Terdapat hubungan yang kuat antara wilayah miskin dengan penduduk

miskin, sehingga dengan mengetahui wilayah miskin dapat diharapkan ditemui mayoritas penduduk miskin.

Selanjutnya Gunawan Sumodiningrat (1997:78) membedakan kemiskinan ke dalam tiga pengertian, yaitu :

a. Kemiskinan Absolut

Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Rendahnya tingkat pendapatan itu terutama disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana fisik dan kelangkaan modal atau miskin karena sebab alami.

b. Kemiskinan Relatif

Adalah pendapatan seseorang yang sudah diatas garis kemiskinan, namun relative lebih rendah disbanding pendapatan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan relatif erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan Kultural ini mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang (disebabkan oleh factor budaya) tidak mau

berurusan untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya.

Adapun ciri-ciri mereka yang tergolong miskin menurut Gunawan

- a. Sebagian besar dari kelompok yang miskin ini terdapat di pedesaan dan mereka ini umumnya buruh tani yang tidak memiliki lahan sendiri. Kalaupun ada yang memiliki tanah luasnya tidak seberapa dan tidak cukup untuk membiayai ongkos hidup yang layak.
- b. Mereka itu pengangguran atau setengah menganggur. Kalau ada pekerjaan maka sifatnya tidaklah teratur atau pekerjaan tidaklah memberi pendapatan yang memadai bagi tingkat hidup yang wajar.
- c. Mereka berusaha sendiri, biasanya dengan menyewa peralatan dengan orang lain. Usaha mereka kecil dan terbatas dengan ketiadaan modal.
- d. Rata-rata semua tidak memiliki peralatan kerja atau modal sendiri. Kebanyakan dari mereka tidak berpendidikan, apabila ada, tingkat pendidikannya rendah.
- e. Mereka kurang berkesempatan untuk memperoleh dalam jumlah yang cukup bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan, komunikasi dan fasilitas kesejahteraan sosial pada umumnya (Gunawan Sumodiningrat, 1997 :19)

Menurut Mohtar Mas'oe'd (2003:34) berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat dibedakan dalam dua jenis yakni :

a. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan ini timbul akibat kelangkaan sumber-sumber daya alam, kondisi tanah yang tandus, tidak ada pengairandan kelangkaan prasarana.

b. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan ini timbul akibat munculnya kelembagaan (seringkali akibat modernisasi atau pembangunan itu sendiri) yang membuat anggota masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana dana fasilitas ekonomi yang ada secara merata (atau disebut juga dengan kemiskinan struktural) (Mohtar Mas'ood, 2003 :138)

Dimensi utama kemiskinan adalah politik, sosial budaya dan psikologi, ekonomi, dan akses terhadap aset. Dimensi tersebut saling terkait dan saling mengunci/membatasi. Kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang miskin umumnya tidak dapat pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit akibat kekurangan air bersih. Kemiskinan adalah ketidak berdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas (world bank). Maka ciri-ciri masyarakat miskin dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Secara politik : tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka.
- b. Secara sosial : tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada
- c. Secara ekonomi : rendahnya kualitas SDM termasuk kesehatan, pendidikan, ketrampilan yang berdampak pada penghasilan.
- d. Secara budaya dan tata nilai : terperangkap dalam budaya rendahnya kualitas SDM seperti rendahnya etos kerja, berfikir pendek, dan fatalisme.
- e. Secara lingkungan hidup : rendahnya pemilikan aset fisik termasuk aset lingkungan hidup, seperti air bersih dan penerangan.

2. Indikator Utama Kemiskinan

Menurut Sahdan (2005) indikator utama kemiskinan adalah:

- a. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan
- b. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan
- c. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan
- d. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha
- e. Lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah
- f. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi
- g. Terbatasnya akses terhadap air bersih
- h. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah

- i. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam
- j. Lemahnya jaminan rasa aman
- k. Lemahnya partisipasi
- l. Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga
- m. Tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat

3. Ciri-Ciri Kemiskinan

Salim (1984: 63) memberikan ciri – ciri kemiskinan sebagai berikut:

- a. Mereka yang tidak mempunyai faktor produksi sendiri (seperti tanah, modal dan keterampilan)
- b. Tidak memiliki kemungkinan untuk memiliki asset produksi dengan kekuatan sendiri
- c. Rata-rata pendidikan mereka rendah
- d. Sebagian besar mereka tinggal di pedesaan dan bekerja sebagai buruh tani. yang tinggal di kota kebanyakan mereka yang berusia muda dan tidak memiliki keterampilan dan pendidikannya rendah..

Menurut Tumanggor dalam Ismail (1999:3) ciri-ciri masyarakat yang berpenghasilan rendah / miskin adalah :

- a. Pekerjaan yang menjadi mata pencarian mereka umumnya merupakan pekerjaan yang menggunakan tenaga kasar.

- b. Nilai pendapatan mereka lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah jam kerja yang mereka gunakan
- c. Nilai pendapatan yang mereka terima umumnya habis untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari.
- d. Karena kemampuan dana yang sangat kurang, maka untuk rekreasi, pengobatan, biaya perumahan, penambahan jumlah pakaian semuanya itu hampir tidak dapat dipenuhi sama sekali.

4. Dimensi Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai memiliki setidaknya 3 Dimensi (Widodo, 2006:296) antara lain:

a. Kemiskinan Politik

Kemiskinan politik memfokuskan pada derajat akses terhadap kekuasaan (power). Kekuasaan dapat mencakup tatanan sistem sosial politik yang menentukan alokasi sumber daya untuk kepentingan sekelompok orang atau tatanan sistem sosial dan menentukan alokasi sumber daya. Jalan untuk mendapatkan akses tersebut dapat melalui sistem politik formal, kontak-kontak informal dengan struktur kekuasaan yang mempunyai pengaruh pada kekuasaan ekonomi.

b. Kemiskinan Sosial

Kemiskinan sosial adalah kemiskinan karena kekurangan jaringan sosial dan struktur yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat. Dengan kata

lain, kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang disebabkan adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

c. Kemiskinan Ekonomi

Kemiskinan dapat diartikan suatu keadaan kekurangan sumber daya (resources) yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya yang tersedia pada kelompok ini dan membandingkannya dengan ukuran-ukuran baku. Sumber daya yang dimaksud dalam pengertian ini mencakup konsep ekonomi yang luas tidak hanya merupakan pengertian finansial, dalam hal ini kemampuan finansial keluarga untuk memenuhi kebutuhan, tetapi perlu mempertimbangkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih jelas mengenai dimensi kemiskinan dapat dilihat di Gambar 1 dimensi kemiskinan (Widodo, 2006:297).

5. Jenis Kemiskinan

Menurut Widodo (2006 : 296) kemiskinan sering dibedakan menjadi dua macam yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang timbul akibat sumber daya yang jumlahnya terbatas atau karena tingkat perkembangan teknologi

yang rendah. Sedangkan kemiskinan buatan adalah kelembagaan yang ada membuat masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata.

Kemiskinan buatan tersebut kini populer sebagai kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural didefinisikan sebagai kemiskinan yang diderita oleh masyarakat karena struktur sosialnya, sehingga tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan yang dimaksud bukanlah kemiskinan yang dialami seorang individu karena ia malas atau terus menerus sakit. Sedangkan kemiskinan struktural tersebut dapat disebabkan karena keadaan pemilikan sumber yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang dan ketidakseimbangan kesempatan dalam berusaha dan memperoleh pendapatan akan menyebabkan keikutsertaan yang tidak seimbang dalam pembangunan (Arsyad, 1997: 219).

Sementara itu menurut Azhari (1992: 32), menggolongkan kemiskinan kedalam tiga macam kemiskinan yaitu :

a. Kemiskinan alamiah

Kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber daya yang langka jumlahnya, atau karena perkembangan tingkat teknologi yang sangat rendah. Termasuk didalamnya adalah kemiskinan akibat jumlah penduduk yang melaju dengan pesat di tengah-tengah sumber daya alam yang tetap.

b. Kemiskinan struktural

Kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial sedemikian rupa, sehingga masyarakat itu tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural ini terjadi karena kelembagaan yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata. Dengan perkataan lain kemiskinan ini tidak ada hubungannya dengan kelangkaan sumber daya alam.

c. Kemiskinan kultural

Kemiskinan yang muncul karena tuntutan tradisi / adat yang membebani ekonomi masyarakat, seperti upacara perkawinan, kematian atau pesta pesta adat lainnya. termasuk juga dalam hal ini sikap mentalitas penduduk yang lamban, malas, konsumtif serta kurang berorientasi kemasa depan.

6. Penyebab Kemiskinan

Menurut Kartasmita dalam Widodo (2006:297) kondisi kemiskinan disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab, yaitu:

- a. Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki.
- b. Rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.

- c. Terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran tersebut.
- d. Kondisi ketersolasian. Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati oleh masyarakat.

Bank Dunia dalam Sahdan (2005) memaparkan penyebab dasar kemiskinan adalah:

- a. Kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal.
- b. Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana.
- c. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor.
- d. Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung.
- e. Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern).
- f. Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat.
- g. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya

- h. Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance).
- i. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Sharp, et.al dalam Kuncoro (2003:131) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola pemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitasnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya. Logika ini

dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, di tahun 1953 yang mengatakan : “a poor country is poor because it is poor” (negara itu miskin karena dia miskin).

7. Pola Kemiskinan

Kemiskinan juga memiliki pola tersendiri baik antar daerah maupun antar individu/keluarga. Menurut Sumodiningrat dalam Widodo (2006 : 298) ada beberapa pola kemiskinan diantaranya sebagai berikut:

- a. Persistent Poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun-temurun. Daerah yang mengalami kemiskinan ini pada umumnya merupakan daerah kritis sumber daya alam atau terisolasi.
- b. Cyclical Poverty, yaitu pola kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.
- c. Seasonal Poverty, yaitu kemiskinan musiman seperti yang sering menjumpai pada kasus-kasus nelayan dan petani tanaman pangan.

8. Model-Model Pengukuran Kemiskinan

- a. Model Tingkat Konsumsi

Pada awal tahun 1970-an, Sayogyo (1971) menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapitasebagai indikator kemiskinan.

Dia membedakan tingkat ekuivalen konsumsi beras di daerah pedesaan dan perkotaan. Untuk daerah pedesaan, apabila seseorang hanya mengkonsumsi ekuivalen beras kurang dari 240 kg per orang per tahun, maka yang bersangkutan digolongkan sangat miskin,

sedangkan untuk daerahperkotaan ditentukan sebesar ekuivalen 360 kg beras per orang per tahun.

b. Model Kesejahteraan Keluarga

Berbeda dengan BPS, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (Khomsan et al, 2015:14) lebih melihat dari sisi kesejahteraan dibandingkan dari sisi kemiskinan. Unit survey juga berbeda di mana pada BPS digunakan rumah tangga sedangkan BKKBN menggunakan keluarga. Hal ini sejalan dengan visi dari program Keluarga Berencana (KB) yaitu "Keluarga yang Berkualitas". Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, BKKBN melakukan program yang disebut sebagai Pendataan Keluarga. Pendataan Keluarga dilakukan oleh BKKBN setiap tahun sejak tahun 1994. Pendataan keluarga dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Terdapat empat kelompok data yang dihasilkan oleh Pendataan Keluarga, yaitu:

- a. Data demografi, misalnya jumlah jiwa dalam keluarga menurut jenis kelamin, dll.
- b. Data keluarga berencana, misalnya Pasangan Usia Subur (PUS), peserta KB, dll.

- c. Data tahapan keluarga sejahtera, yaitu jumlah keluarga yang masuk dalam kategori keluarga pra-sejahtera, sejahtera I, II dan III.
- d. Data individu, seperti nomor identitas keluarga, nama, alamat, dll.

Data-data tersebut dikumpulkan setiap tahun dari bulan Oktober sampai dengan Desember oleh para Kader Keluarga Berencana (KKB) yang difasilitasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Data kemiskinan dilakukan lewat pentahapan keluarga sejahtera yang dibagi menjadi lima tahap, yaitu:

- a. Keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin)
- b. Keluarga Sejahtera I (miskin)
- c. Keluarga Sejahtera II
- d. Keluarga Sejahtera III
- e. Keluarga Sejahtera III plus

Dari data tersebut kemudian didapatkan jumlah keluarga miskin dari mulai tingkat RT, Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi sampai dengan tingkat Nasional.

9. Pengertian dan Indikator Kesejahteraan

Pra Sejahtera (sangat miskin) diartikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan. Sejahtera tahap I (miskin) diartikan sebagai keluarga yang mampu memenuhi.

Kebutuhan dasarnya tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Yang dimaksud kebutuhan sosial psikologis adalah kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

Berikut adalah indikator yang digunakan BKKBN dalam pentahapan keluarga sejahtera:

a. Keluarga Pra Sejahtera (Sangat Miskin)

Belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi:

1) Indikator Ekonomi

Makan dua kali atau lebih sehari Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, bekerja/ sekolah dan bepergian) Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.

2) Indikator Non-Ekonomi

Melaksanakan ibadah Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan.

b. Keluarga Sejahtera I (Miskin)

Adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi:

1) Indikator Ekonomi

Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru Luas lantai rumah paling kurang 8 m persegi untuk tiap penghuni

2) Indikator Non-Ekonomi

Ibadah teratur Sehat tiga bulan terakhir Punya penghasilan tetap

Usia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf latin Usia 6-15 tahun

bersekolah Anak lebih dari 2 orang, ber-KB

c. Keluarga Sejahtera II

Adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi:

- 1) Memiliki tabungan keluarga
- 2) Makan bersama sambil berkomunikasi
- 3) Mengikuti kegiatan masyarakat
- 4) Rekreasi bersama (6 bulan sekali)
- 5) Meningkatkan pengetahuan agama
- 6) Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV,
- 7) dan majalah
- 8) Menggunakan sarana transportasi

d. Keluarga Sejahtera III

Sudah dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi:

- 1) Memiliki tabungan keluarga
- 2) Makan bersama sambil berkomunikasi
- 3) Mengikuti kegiatan masyarakat
- 4) Rekreasi bersama (6 bulan sekali)
- 5) Meningkatkan pengetahuan agama
- 6) Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV,

- 7) dan majalah
- 8) Menggunakan sarana transportasi

Belum dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi:

- 1) Aktif memberikan sumbangan material secara teratur
- 2) Aktif sebagai pengurus organisasi masyarakat.

B. Program Kampung Keluarga Berencana

1. Konsep Kampung KB

Program Kampung Keluarga Berencana atau yang lebih dikenal dengan program Kampung KB merupakan salah satu contoh dalam pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan melibatkan seluruh Bidang yang ada di lingkungan BKKBN dan bekerja sama dengan instansi terkait dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat, serta dilaksanakan ditingkat pemerintah terendah (RW/RT).

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB merupakan salah satu model pelaksanaan total program KKBPK serta merupakan program strategis dalam upaya percepatan agenda program pembangunan khususnya pada daerah pinggiran.

Kampung KB dibentuk sebagai salah satu upaya penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sehingga dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kampung KB direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.

2. Tujuan Kampung KB

Menurut data BKKBN terdapat dua tujuan pada program Kampung KB yaitu:

a. Tujuan umum:

- 1) Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

b. Tujuan khusus:

- 1) Meningkatkan peran pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta untuk menyelenggarakan program kependudukan.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.
- 3) Meningkatkan peserta KB aktif modern.

- 4) Meningkatkan Ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) serta Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja.
- 5) Meningkatkan pemberdayaan keluarga (kelompok UPPKS).
- 6) Meningkatkan drajat kesehatan masyarakat.
- 7) Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- 8) Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung.
- 9) Meningkatkan lingkungan kampung yang bersih dan sehat.
- 10) Meningkatkan kualitas sekolah penduduk usia sekolah
- 11) Meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air pada masyarakat.

3. Prasyarat Pembentukan Kampung KB

Proses pembentukan suatu wilayah akan dijadikan sebagai lokasi Kampung KB perlu memperhatikan prasyarat wajib yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Tersedianya data kependudukan yang akurat. Data ini bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data Potensi Desa dan data Catatan Sipil yang akan digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan disuatu wilayah Kampung KB secara berkesinambungan.

- b. Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah. Dukungan dan komitmen yang dimaksud adalah dukungan, komitmen dan peran

aktif seluruh instansi/unit kerja pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang instansi masing-masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

- c. Partisipasi aktif masyarakat, partisipasi aktif masyarakat yang dimaksudkan adalah partisipasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di Kampung KB secara berkesinambungan guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat.

4. Kriteria Pemilihan Wilayah Kampung KB

Menurut data BKKBN dalam memilih atau menentukan wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung KB ada tiga kriteria yang dipakai, yakni kriteria utama, kriteria wilayah dan kriteria khusus, yaitu:

a. Kriteria Utama

1. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata

Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa/kelurahan di mana kampung tersebut berada.

2. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.

b. Kriteria Wilayah dalam pembentukan Kampung KB mencakup 10 kategori wilayah (dipilih salah satu), yaitu:

- 
1. Kumuh
 2. Pesisir atau Nelayan
 3. Daerah Aliran Sungai (DAS)
 4. Bantaran Kereta Api
 5. Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan)
 6. Terpencil
 7. Perbatasan
 8. Kawasan Industri
 9. Kawasan Wisata
 10. Padat Penduduk.

c. Kriteria Khusus

1. Kriteria data, dimana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data Kependudukan dan atau pencacatan sipil yang akurat.

2. Kriteria kependudukan, dimana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah.
3. Kriteria program Keluarga Berencana, dimana peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa atau keluarahan

C. Kebijakan Publik

1. Konsep Kebijakan Publik

Anderson dalam Mulyadi (2016:165), mendefinisikan kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan atau tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Nugroho dalam Mulyadi (2016:165), mengemukakan kebijakan publik adalah usaha pencapaian tujuan atau sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk mencapai tujuan yang dapat disederhanakan dengan mengetahui sejauh mana kemajuan pencapaian yang telah ditempuh.

Menurut Dye dalam Suaib (2016:72), kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan

publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah itulah yang memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan atau program-program yang dilakukan pemerintah.

Jenkin dalam Suaib (2016:74), mengatakan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan, yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu :

- 1) Perumusan kebijakan
- 2) Implementasi kebijakan
- 3) Evaluasi kebijakan
- 4) Revisi kebijakan, yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan (Riant Nugroho, 2009 : 145).

Sebuah kebijakan mungkin saja merupakan sesuatu yang tidak disengaja tetapi ia tetap dilaksanakan dalam implementasi

atau praktik administrasi. Makna kata kebijakan juga harus dipahami dalam konteks historis. Pasalnya, sebagaimana konsep publik, maka kebijakan yang senantiasa berubah ini menunjukkan kepada kita perubahan-perubahannya dalam praktik kebijakan (Wayne Parsons, 2006 : 14).

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Riant Nugroho, 2009 : 494).

Implementasi kebijakan merupakan hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Peter dan Linda de Leon, pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan dikelompokkan menjadi tiga generasi, yaitu :

- 1) Generasi pertama, yaitu pada tahun 1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya.

- 2) Generasi kedua, yaitu pada tahun 1980-an, adalah generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat “dari atas ke bawah” (top-downer perspective). Perspektif ini lebih fokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik.
- 3) Generasi ketiga, yaitu pada tahun 1990-an, memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku aktor pelaksanaan implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Riant Nugroho, 2009 :501).

Dalam proses pembuatan kebijakan yang merupakan serangkaian tahap demi tahap yang meliputi :

- 1) Penyusunan agenda kebijakan

Pada tahap ini terdapat perumusan masalah guna mencari pengetahuan yang relevan dengan kebijakan terhadap definisi masalah proses pembuatan kebijakan. Perumusan tersebut membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan baru.

- 2) Formulasi kebijakan

Tahap ini memerlukan pemahaman yang dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang terjadi di masa mendatang sebagai tindakan alternatif.

Peramalan menguji masa depan yang potensial, secara normatif bernilai, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan (Sujianto, 2008 : 38).

3) Adopsi kebijakan

Dalam tahap ini melakukan rekomendasi terhadap alternatif yang akan dipilih melalui pendekatan pengetahuan yang relevan dengan prinsip-prinsip kebijakan. Rekomendasi membantu estimasi tingkat rasional dan ketidakpastian, mengenali eksternalisasi dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan keputusan pilihan, dan menentukan pertanggung jawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

4) Implementasi kebijakan

Pada tahap ini pengambilan kebijakan berusaha melakukan pemantauan (monitoring) tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya atas dasar pengetahuan yang relevan dengan konsep-konsep tersebut. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak-letak pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan.

5) Evaluasi kebijakan

Di bagian evaluasi membutuhkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan terhadap ketidak sesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Tujuan ini membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan, menyumbangkan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian masalah.

3. Faktor Penghambat Kebijakan Publik

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

3. Penelitian Relevan

1. Hasil Penelitian Istiadi,A. (2017).

Istiadi (2017) melakukan penelitian dengan judul Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Pada Kelompok Sasaran Keluarga Dengan Remaja di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Penelitian dilaksanakan dengan mengkaji sejauh mana implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk tersebut.

Menjawab permasalahan ini, penelitian mengkaji Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana dengan menggunakan teori Implementasi Menurut George C. Edward III (dalam Handoyo, Eko. 2008 : 112) yang mencakup : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif yang mana akan memberikan suatu gambaran penjelasan sesuai dengan permasalahan yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hampir semua indikator sudah berjalan dengan sangat baik terkait pelaksanaan program Kampung KB di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk khususnya pada kegiatan Bina Keluarga Remaja, hanya saja masih terdapat masalah pada

indikator disposisi yaitu sikap yang mana diberikan oleh para kader Kampung KB yang dinilai kurang berkompeten dalam melaksanakan tugasnya, hal ini bila dibiarkan terus menerus maka nantinya bisa menjadi penghambat keberhasilan Program Kampung KB.

Keterkaitan rencana peneliti dengan hasil penelitian Istiadi (2017) adalah persamaan pada fokus penelitian yang membahas tentang Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana. Serta metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi penggunaan penerapan teori implementasi serta tempat penelitiannya.

2. Hasil penelitian Pramithasari (2015)

Pramithasari (2015) melakukan penelitian dengan judul Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) Di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya. Penelitian dilaksanakan dengan mengkaji sejauh mana implementasi Program Keluarga Berencana di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya tersebut mengingat adanya masalah rendahnya kualitas petugas dalam mengimplementasikan program KB dikarenakan tingkat pendidikan yang dimiliki petugas tersebut termasuk dalam indikator karakteristik agen pelaksana serta . Masalah tentang keyakinan dan budaya atau adat istiadat yang dimiliki masyarakat Kelurahan Jeruk, serta

rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang menjadi penghambat pengimplementasian program KB, termasuk dalam indikator kondisi sosial.

Menjawab permasalahan ini, penelitian mengkaji Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang meliputi : Standar, Tujuan dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Hubungan antar organisasi, Karakteristik agen pelaksana, Disposisi implementor, Kondisi sosial, ekonomi dan politik. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif yang mana akan memberikan suatu gambaran penjelasan sesuai dengan permasalahan yang ada. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pelaksanaan program KB para agen pelaksana mempunyai karakteristik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sehubungan dengan penelitian ini, pelaksanaan program KB mendapatkan respon yang positif dari para pelaksana yaitu Bapemas dan KB Kota Surabaya khususnya bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan sub bidang KB. Para pelaksana tersebut sudah paham dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan para petugas pelaksana program KB juga

sudah ditempatkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Keterkaitan rencana peneliti dengan hasil penelitian Anindya (2015) adalah persamaan pada metode penelitian yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teori yang digunakan juga sama menggunakan teori Implentasi dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. perbedaanya adalah dari segi judul dan fokus penelitian serta daerah penelitiannya.

4. **Kerangka Berpikir**

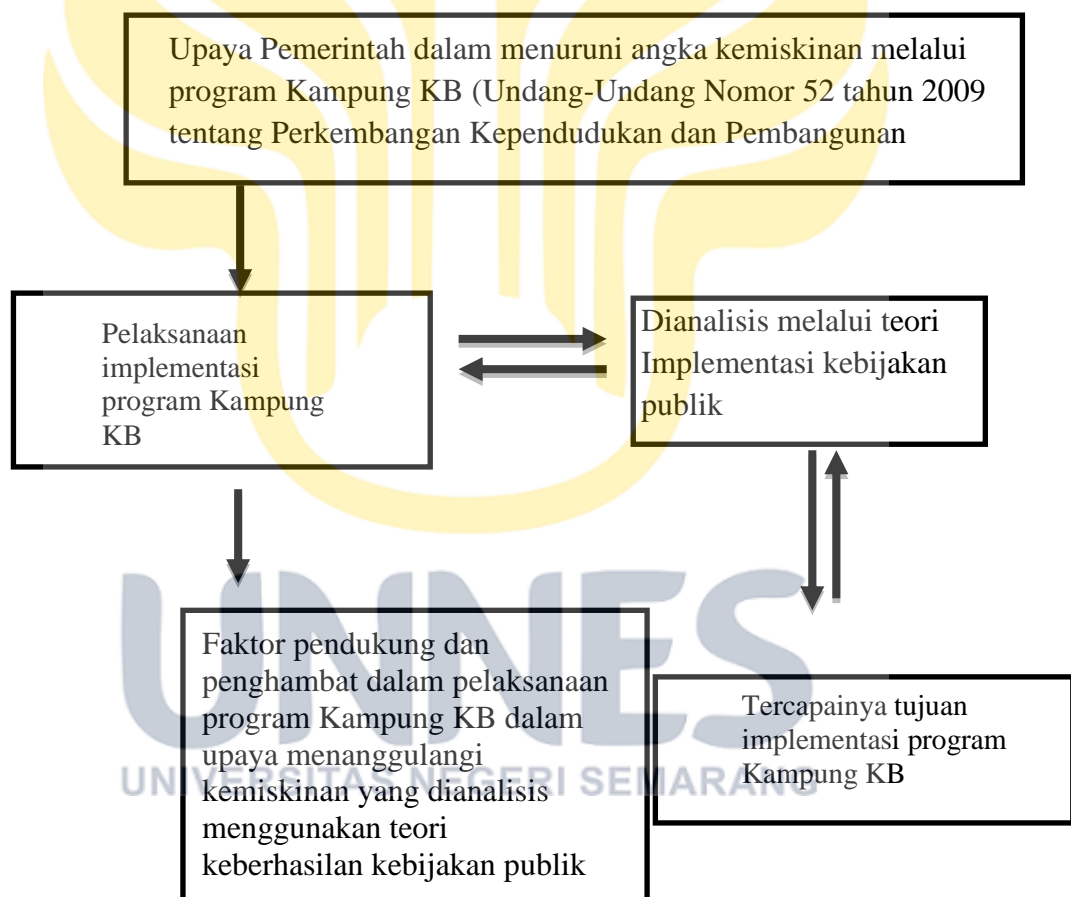
Pertumbuhan penduduk saat ini semakin meningkat menjadi masalah besar di Indonesia, hal ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan baik ekonomi maupun sosial, terutama peningkatan mutu kehidupan atau kualitas penduduk dalam sumber daya manusia yang dibarengi besarnya jumlah penduduk yang tidak terkontrol.

Selain itu, upaya dari pemerintah khususnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dalam mengatasi masalah kependudukan dengan program Keluarga Berencana belum maksimal, bahkan melemah serta mengalami penurunan.

Melihat keadaan tersebut, Perlu adanya tindakan membangkitkan dan menguatkan kembali program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Oleh

karena itu, Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) menggagas Program Kampung Keluarga Berencana.

Salah satu Desa yang menerapkan Program Kampung Keluarga Berencana adalah Kelurahan Dadapsari. Desa tersebut digagas sebagai desakampung Keluarga Berencana karena memiliki kriteria-kriteria yang tergolong wilayah penerapan kampung Keluarga Berencana. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana Implementasi Kampung Keluarga Berencana di desa tersebut.



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2019

BAB 5

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi Program Kampung KB di Kelurahan Dadapsari berjalan baik dan memberikan dampak dan manfaat yang cukup besar kepada masyarakat baik dalam aspek kesehatan, sosial maupun ekonomi. Utamanya adalah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Adanya Kampung KB memberikan edukasi kepada masyarakat baik pada aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi keluarga. Dalam hal ini keberadaan Kampung KB di Kelurahan Dadapsari telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Peranan pemerintah dan juga elemen-elemen masyarakat menjadi faktor pendorong yang sangat penting bagi berlangsungnya program Kampung KB di Kelurahan Dadapsari. Pemerintah melalui dukungannya secara formal dan juga elemen-elemen masyarakat yang secara praktis bahu membahu demi keberlangsungan program Kampung KB ini. Sementara itu faktor penghambat pelaksanaan program kampung KB di Kelurahan Dadapsari meliputi dua faktor utama yakni kesadaran masyarakat yang rendah, serta kurangnya tenaga penyuluh yang membuat pelaksanaan program kampung KB di Kelurahan Dadapsari berjalan kurang maksimal.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya lebih meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan program Kampung KB, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
2. Pemerintah seharusnya menampah jumlah personil tenaga penyuluh agar program Kampung KB dapat berjalan maksimal.
3. Masyarakat sebaiknya lebih proaktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan Kampung KB, karena tujuan akhir dari program ini salah satunya adalah mensejahterakan masyarakat.